

**TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
(Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia)**

DISERTASI

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Doktor Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Kewarganegaraan**



Oleh:

ENDANG

NIM 1302443

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021**

Endang, 2021

*TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
(Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia)**

Oleh
Endang

Dr. UPI, Bandung, 2021
M.H. dalam Hukum Administrasi Negara, STH Bandung, 2011

Sebuah Disertasi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor Pendidikan (Dr.) pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Endang 2021
Universitas Pendidikan Indonesia
September 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Disertasi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

ENDANG

**TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia)**

Promotor/Penguji I:

Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd.
NIP 195302111978031002

Ko-Promotor/Penguji II:

Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ph.D.

Anggota/Penguji III:

Dr. Prayoga Bestari, M.Si.
NIP 197504142005011001

Penguji IV:

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.
NIP 196909291994021001

Penguji V:

Prof. Dr. Dedi Mulyasana, M.Pd.
NIP/NIDN 195701281984031001/0028025701

Mengetahui

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia,

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.
NIP 196909291994021001

Endang, 2021

**TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tata kelola bidang kepegawaian pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan” (Studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia/UPI), bertujuan untuk menemukan formulasi sistem pengelolaan pegawai dan sistem tunjangan kinerja. Alasan dilaksanakannya penelitian ini karena pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) di UPI, khususnya di bidang kepegawaian dipandang bermasalah dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tenaga Kependidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: sistem pengelolaan pegawai di UPI menerapkan multi sistem kepegawaian dengan disparitas hukum kepegawaian yang dirasakan diskriminatif dalam penegakkannya, dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kependidikan karena terabaikannya hak-hak kepegawaian baik dalam aspek pengembangan karir dan aspek finansial antara lain sistem Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini disebabkan, selain oleh sikap Pemerintah terhadap PTNbh yang dianggapnya sudah mandiri, juga lemahnya regulasi sistem kelembagaan dan kepegawaian di PTNbh. Oleh karena itu perlu memulihkan hak-hak pegawai di PTNbh dengan membuat Undang-Undang PTNbh yang mewadahi, menaungi dan melingkupi semua aspek dari pengembangan PTNbh yang membawa dampak strategis guna memberikan jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama bagi Tenaga Kependidikan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, sistem pengelolaan pegawai, Undang-Undang PTNbh.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ABSTRACT

This study entitled "Management of the field of civil service at a legal entity State Universities in the perspective of Citizenship Education" (a case study at the Indonesian Education University/UPI), aims to find the formulation of the employee management system and performance allowance system. The reason for carrying out this research is because the implementation of the autonomy of legal entity State Universities (PTNbh) at UPI, especially in the field of personnel is seen as problematic and creates a sense of injustice for Education Personnel. The research method used is a case study with a qualitative approach and normative juridical. The results show: the employee management system at UPI implements multiple employment systems with disparities in employment law which is perceived as discriminatory in its enforcement, and has caused injustice to educational staff due to neglect of employment rights both in career development and financial aspects, including the Performance Allowance system that not according to the rules. This is due, apart from the Government's attitude towards PTNbh which it considers to be independent, as well as the weak regulation of the institutional and staffing system at PTNbh. Therefore, it is necessary to restore the rights of employees at PTNbh by enacting a PTNbh Law that accommodates, overshadows and covers all aspects of PTNbh development that have a strategic impact in order to provide guarantees, protection, fair legal treatment, legal certainty, and equal treatment for Education Personnel in accordance with their responsibilities as citizens.

Keywords: legal entity State Universities, employee management system, PTNbh Law.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Paradigma Penelitian	39
C. Rumusan Masalah	41
D. Tujuan Penelitian	42
E. Manfaat Penelitian	42
F. Struktur Organisasi Disertasi	44
BAB II KAJIAN PUSTAKA	45
A. <i>Grand Theory</i> tentang <i>Good University Governance</i> dan <i>Reinventing the University</i>	45
B. Pengertian Otonomi dan Hakikat Otonomi Perguruan Tinggi	51
C. Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh)	62
D. Otonomi Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pendidikan	98
E. PTNbh sebagai lembaga Suigeneris	104
F. Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Pendidikan Kewar- ganegaraan	108
G. Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan	116
H. Hubungan Warga Negara dan Kebijakan Publik dengan	

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Pendidikan Kewarganegaraan	153
	I. Penelitian yang Relevan	168
BAB III	METODE PENELITIAN	173
	A. Desain Penelitian	173
	B. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	176
	C. Lokasi dan Subjek Penelitian	178
	D. Tahap-tahap Penelitian	182
	E. Penentuan Responden dan Kisi-Kisi Penelitian	185
	F. Uji Validitas Data Penelitian	185
	G. Jadwal Penelitian	187
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	188
	A. Gambaran Umum	188
	1. Dasar Hukum Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi ..	188
	2. Pola pengelolaan PTNbh	189
	3. Tata kelola/organisasi PTNbh	190
	4. Tata kelola/organisasi PTNbh UPI	190
	5. Akuntabilitas PTNbh	193
	6. Profil Pegawai UPI	193
	B. Pemaparan Hasil Penelitian dan Pembahasan	194
	1. Sistem pengelolaan pegawai bagi tenaga kependidikan di PTNbh dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban pegawai sebagai warga negara	195
	2. Sistem tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan di PTNbh dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban pegawai sebagai warga negara	296
	3. Sikap Pemerintah terhadap PTNbh dan hak-hak yang melekat pada pegawai di PTNbh	340
	4. Penguatan Regulasi Sistem Kelembagaan Dan Kepegawaian di PTNbh	342
	C. Temuan Hasil Penelitian dan Dalil-dalil	348
	D. Tindak lanjut hasil temuan	360
BAB V	KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	364

A. Kesimpulan	364
1. Kesimpulan Umum	364
2. Kesimpulan Khusus	364
B. Implikasi	365
1. Implikasi Teoretis	366
2. Implikasi Praktis	366
C. Rekomendasi	367
1. Kepada pihak Kemendikbudristek	367
2. Kepada pihak Kemenpan-RB	368
3. Kepada pihak Kemenkeu.....	368
4. Kepada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN)	368
5. Kepada pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ..	369
6. Kepada pihak internal PTNbh UPI	369
7. Kepada pihak Peneliti selanjutnya	370
DAFTAR PUSTAKA	371
LAMPIRAN	391
DALIL-DALIL	455
RIWAYAT HIDUP PENULIS	456

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (1986). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Abdul Wahab, Solichin. (2015). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ali, C. (1975). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, C. (1991). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. Bandung Alumni.
- Amos, T.L.,Risrow, A.,Ristow, L.,Pearse, N.J. (2008). *Human Resource Management*. Cape Town: Juta and Co Ltd.
- Anderson, J.E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, FH-UI.
- Arinanto, S. dan Triyanti, N. (2011). *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J,. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Atmadja, A.P.S. (1986). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia.
- Atmadja, A.P.S. (2009). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Penyempurnaan Kebijakan Sistem Remunerasi PNS Menuju Good Governance*. Jakarta: Direktorat Aparatur Negara.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia.
- Bakhtiar, Amsal. (2004). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Barry, N.P. (1981). *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin's Press.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Cetakan ke-2. Bandung: Alumnus.
- Berger, P. L. (2004). *Piramida Kurban Manusia; Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Berman, E.M., Bowman, J.S., West, J.P., Wart, M.V. (2006). *Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems*. California: Sage Publication, Inc.
- Bernardin, H.J. (2007). *Human Resource Management* (New York: McGraw-Hill Irwin).
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Branson, M.S, dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Terjemahan oleh Syafrudin, M. Yasir Alimi, M. Nur Khoiron. Yogyakarta: LKiS.
- Brodjonegoro, S.S., (2013). *Marginalisasi Perguruan Tinggi*. (Opini) Diakses dari laman <https://aipu.or.id/frontend/opinion/detail/4232315150773d3d>).
- (2013). *Dejawatanisasi Pendidikan*. (Opini). Diakses dari laman <https://edukasi.kompas.com/read/2013/03/09/13252223/Dejawatanisasi.Pendidikan?page=all>).
- Bruggink, J.J.H. (1999) *Refleksi Tentang Hukum* (Terjemahan Bernhard Arief Sidharta). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Budimansyah, D., Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: SPs UPI.
- Byars, L.L., dan Rue, L.W. (2008). *Human Resource Management*. New York: McGraw-Hill Company
- Center for Civic Education (CICED). (1998). *We the People...Project Citizen: A Civic Education Project for Grades 6 Through 9*. Calabasas: CICED and National Conference of States Legislatures.
- Chaidir, E. (2008). *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media.
- Cheminais, J., van der Wal, G., Fox, W., Bayat, M.S. (1998). *Fundamentals of Public Personnel Management*. Kenwyn: Juta and Company Ltd.
- Cranston, M. (1973). *What Are Human Rights?* New York: Basics Books.
- Creswell, J.W. (1998). *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. London: Publication.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods. Third Edition Approaches*. @SAGE Publications. Thousand Oaks California.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Daft, R.L. (2003). *Management*. Ohio: Thomson-South-Western.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003-2010. Menuju Sinergi Kebijakan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional (2004). *Buku Pendukung HELTS 2003-2010. Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010. Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dye, T.R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prectice Hall.
- Dye, T.R. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Perason Education Inc.
- Effendi, S. (1999). *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Negara untuk Mendukung Masyarakat Madani*. Presentasi pada Kursus ADUM Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), 29 Agustus 1999.
- Effendi, S. (2009). *Reformasi Birokrasi Generasi Kedua*. Kompas, Kamis, 10 September 2009.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumnii.
- Flippo, E.B. (1994). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga.
- Fombrun, C.J.,Tichy, N.M., Devana, M.A. (1984). *Strategic Human Resource Management*. New York: John Wiley.
- Freeman, M. (1995). "Human Rights: Asian and the West" dalam James T. H. Tang (ed). *Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region*. London: Pinter. Hlm 13-24.
- Friedrich, C. (1963). *Man and His Goverment*. New York: Mc Graw-Hill.
- Gomez-Mejia, L.R.,Balkin, D. (1992), *Compensation, Organizational Strategy and Firm Performance*. Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing, Co.
- Ghazali, A. Muchtar, dan Abdul Majid. (2014), *Civic Education, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bandung: Interes Media Foundation.
- Goodnow. F.J. (1900). *Politics and Administration*. New York: MacMillan.
- Gray, G. (1979). *Civil Service Compensation in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 15 (1), 85-113.
- Gunakaya, A. Widiada. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Yayasan Guna Harapan Baru.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Hadjon, P.H. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Handoko, M. (1992). *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartini, S, et.al. (2014). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, M.S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hiam, A. (1999). *Motivating & Rewarding Employees*. Massachusetts: Adams Media Corporation.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huijbers, Theo. (1986). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. (2000). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ivancevich, J.M. (2007). *Human Resource Management*. New York: McGraw Hill.
- Ivancevich, J.M., Glueck, W.F. (1986) *Foundation of Personnel/Human Resource Management*, 3rd Edition. Texas: Business Publication, Inc.
- Jawwad, A,B. (2004). *Mengembangkan Inovasi dan Kreatifitas Berpikir Pada Diri dan Organisasi Anda*. Bandung: PT. Syamiil Cipta Media.
- Jones, B dan Thompson, K dalam Rene Seerden dan Frits Stroink (Eds.). (2002). *Administrative Law Of the European Union, its Member States and the United States*. Groningen: Intersentia Uitgevers Antwerpen.
- Kaelan, dan Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: PARADIGMA.
- Kansil, C.S.T. (2000). *Pokok-pokok Badan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (t.t.). *Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi*. Jakarta: Tim Sosialisasi Undang Undang Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khaliq, F.A. (2005). *Fikih Politik Islam*, terjemahan Faturrahman A. Hamid. Jakarta: AMZAH.
- Khan W, Mufti EO. (2012). Effect of compensation on motivating employees in public and private banks of Peshawar (BOK and UBL). *J Basic Appl Sci Res*. 2(5):4616–23.
- Kirana, A., dan Vita, I. (t.t.). *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, Cetakan Perama, Penerbit: CV Cipta Kirana.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Kleden, I. (1996) *Lingking dan Delingking Dalam Pendidikan dan Kebudayaan; Mempertanyakan Konsep Link dan Match*, dalam majalah BASIS Nomor03-04 tahun ke-45 Mei-Juni,1996.
- Klinger, D.E & Nalbandian, J. (1993). *Public Personnel Management: Contexts and Strategies*. New York: Prentice Hall.
- Kreitner, R.,Kinici, A. (2004). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Kumorotomo, W. (2008). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2008). *Isu Aktual Sesuai Tema*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- (2008). *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lincoln, YS dan Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Lotulong, P.E. (1993). *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Luthans, F. (2008). *Organizational Behavior*, 11th Edition. Boston: McGraw-Hill.
- Madjid, N. (2003). *Islam Agama Kepercayaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cetakan 2. Jakarta: Paramadina.
- Madura, J. (2007). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahfud, MD. (1988). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- (2009). *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. 3, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkunegara, A.P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marbun, S.F dan Mahfud, M. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marginson, S. & Considine, M. (2000). *The Enterprise University: Power, Governance and Reinvention in Australia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marsono, S.D. (1990). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- McKenna, E. (2006). *Bussiness and Psychology: Organizaional Behavior*. New York: Psychology Press.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Miles, M & Huberman, AM. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Milkovich, G.T., Newman, J.A. (2005). *Compensation*. Boston: Irwin McGraw-Hill.
- Milne, A.J.M. (1986). *Human Rights and Human Diversity*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire dan London: Macmillan.
- Moekijat. (1989). *Manajemen Kepegawaian*. Mandar Maju: Jakarta
- Moekijat. (2000). *Kamus Manajemen*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kota Bandung: PT . Remaja Rosdakarya.
- Mondy, R.W., Sharplin, A., Flipo, E.B. (1995). *Management: Concepts and Practice, Fourth Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Morris, C (eds). (1979). *The Great Legal Philosophers*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Mowday, R.T. (1983). Equity Theory Predictions of Behavior in Organization. In R.M. Steers and LW Porters (Eds). *Motivation and Work Behavior*. New York: McGraw Hill.
- Muchsan. (1982). *Hukum Kepegawaian Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis*. Jakarta: Bina Aksara.
- (1997). *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, F. (2008). *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Musanef. (1984). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nainggolan, H. (1984) *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: BAKN.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Newstrom, J.W. (2007). *Organization Behavior: Human Behavior at Work*. Boston: McGraw Hill.
- Nitisemito, A, (1998). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, H. (2002). *Mcdonalisasi Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nugroho, H. (2006). *Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan, dalam Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakedae (ed), Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Nurdin, E. S. (2015). The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia. *International Education Studies*. 8 (8), 199-209.
- Panggabean, M.S. (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patnaik BCM, Padhi PC. Compensation management: a theoretical preview. *Trans Asian J Market Man Res*. 2012;1(1):39–44.
- Patton, T. (1977). *Pay: Employee Compensation and Incentive Plans*. New Yor: McMillan.
- Peppard, J.,Rowland, P. (1997). *The Essence of Bussiness Process Re-Engineering*, Terhemaan Fandy Tjipto Nomor Yogyakarta: Andi.
- Poesoko, Herowati. (2018). *ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU*. Editor: Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Pramono, N. (2007). *Pesembahan Kepada Sang Maha Guru, Seputar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: FH-UGM.
- Prasojo, E. (2009). *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pratt, K.J & Bennett, S.G. (1989). *Elements of Personnel Management*. London: Taylor & Francis.
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum* Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI PRESS.
- (2014). *Ilmu Hukum*. (Cetakan Kedelapan 2014). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili., dan Ira Thania, Rasjidi. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rido, R,A. (1984). *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya.
- Rido, R,A. (2001). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan, H.R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ridwan, H.R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali Pres.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Riyanto, Astim. (2006). *NEGARA KESATUAN Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*. Bandung: YAPEMDO.
- (2010). *Kapita Selekta, Hukum Dalam Dinamika*. Bandung: YAPEMDO.
- Robbins, S. (2003). *Perilaku Organisasi (jilid 1)*. Jakarta: Gramedia.
- Ruky, A.C. (2006). *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia.
- Saefullah, D. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Aifi Bandung.
- Saleh, Sjariff. (t.t.). *Otonomi dan Daerah Otonom*. DJAKARTA: NV. PUSTAKA & PENERBIT “ENDANG”.
- Samsudin, S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajalawi.
- Schunk, D.H., Pintrich, P.R., Meece, J.L. (2008). *Motivation in Education: Theory, Research and Application*. New Jersey: Uppers Saddle River.
- Seldadyo, H. (2005). *Gaji Pegawai dan Korupsi* (Harian Kompas Edisi Jumat, 17 Juni 2005).
- Siagian, S. P. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, H. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ke-2*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Simanungkalit, J. H.U.P, et.al (2006). *Penyusunan Struktur Gaji Pegawai Negeri Sipil Berbasis Bobot Jabatan dan Kebutuhan layak dalam rangka Keadilan Internal dan Eksternal Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian Negara.
- Situmorang, V.M. (1989). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco.
- Starling, G. (2008). *Managing the Public Sector*. USA: Thomson Wadsworth.
- Stiglitz, J.E. (2006). *Making Globalization Work*, London, England: Penguin Books.
- Strauss, A. & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, R. & Tjitrosoedibio, R. (2003). *KAMUS HUKUM*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2007). *KAMUS HUKUM*. Jakarta: Rineka Cipta.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2011) (Editor). *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwarma Al-Muchtar,.(2010). *Memperkokoh Keilmuan dan Profesionalisme Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- . (2017). *Ilmu Kewarganegaraan. Konstruksi Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- . (2017). *Filsafat Politik*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Suwito. (tt). *Standar Pendidikan Yang Melebihi SN Dikti Untuk Perguruan Tinggi (PTA PTN Satker, PTA PTN BLU, PTA PTN BH, PTA PTS, PTV PTN Satker, PTV PTN BLU, PTV PTS)*.
- Syafrudin, Ateng (1985). *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta.
- Thoha, M. (1986). *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thoha, M. (2008). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thompson, F.J. (1989). *Managing Within Civil Service System*. Handbook of Public Administration, James L. Perry (ed). California: Jossey-Bass Inc. Publishers.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjandra, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- . (2014). PEMISAHAN KEKAYAAN NEGARA DI BUMN (1 Oktober 2014). diakses pada laman <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>.
- Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kualitas Aparatur Pemerintah Era Reformasi dalam wacana Pengembangan Kepegawaian*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- UPI at a GLACE. (2019). *Mengukuhkan Jati Diri Pendidikan Untuk Meraih Kepeloporan dan Keunggulan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Utrecht, E. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unpad.
- Van Apeldoorn. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Von Savigny, F.C. (1986). System des heutigen romuschen Rechts dalam Ali Ridho. (1986). Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni.
- Wahab, A.A., Sapriya. (2011). Teori dan Landasan PKN. Bandung: Alfabeta.
- Walker, J.W.M. (1992). Human Resources Strategy. New York: McGraw Hill, Inc.
- Warta SDM UGM. (2014). Edisi Tukin. Yogyakarta: Direktorat Sumber Daya Manusia, Universitas Gadjah Mada.
- Warta SDM UGM. (2018). Edisi Insentif Berbasis Kinerja. Yogyakarta: Direktorat Sumber Daya Manusia, Universitas Gadjah Mada.
- Weick, K.E., Nettet, B. (1968). Preference among Forms of Equity. *Organizational Behavior and Human Performance*. 3, 400-416.
- Werther, W.B., Davis, J. (1996). Human Resources and Personnel Management 5th Edition. USA: Irwin McGraw-Hill.
- Widjaja, A.W. (2006). Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali.
- Widjaya, I.G. R. (2006). Hukum Perusahaan. Bekasi: Megapoint.
- Wijatno, S. (2009). Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Winataputra, U.S., Budimansyah, D. (2012). PKN dalam Perspektif Internasional: Kontes, Teori, dan Profil Pembelajaran. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winarno. (2009). Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis. . Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2014). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wursanto, I.G. (1985). *Manajemen Kepegawaian 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wursanto, I.G. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.

Jurnal/Artikel

- Alawiya, N., Y., Uliantiningasih, A., Sudrajat, T., dan Sari, D.P.Y.P. (2013). Kebijakan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil: Analisis Meteri Muatan Penentuan Nilai dan Kelas jabatan dalam Pemberian Renumerasi. *Jurnal Dinamika Hukum*. 13 (2), 210-216.
- Armiwulan, H. (2013). Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negera atas Hak Asasi Manusia. *RechtIdee Jurnal Hukum*. 8 (1), 95-119.
- Djumiarti, Titik. (tt). Menggagas Strategi Reinventing Government Dalam Memantapkan Kehidupan Berbangsa dalam http://eprints.undip.ac.id/19403/1/Artikel_Forum_Nasionalisme_baru_sekali.pdf.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Fathoni, M.K. (2011). Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 17 (3), 299-305.
- Ghinarahmatina, Amalia. (2018). Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. Vol 2 No. 2, 2018.
- Harahap, N. A. (2016). Perlindungan Hukum bagi Aparatur Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Yuridis*. 3 (2), 129-144.
- Haris, H. (2009). *Reinventing the University* | DiscoverScholars.org Blog (wordpress.com)
- Hogantara, A dan Sintaasih, D. K. (2015). Pengaruh Tingkat Kesejahteraan, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Aroma Spa, Sanur Denpasar. *Jurnal Manajemen*, (Online), 4 (2): 350.
- Keban, Y. T. (2004). “Pokok-pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 8 (2).
- Mahendra, Y. I. (2003). Konsepsi Islam tentang HAM dan Persaudaraan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*. 1, 134-137.
- Mariana, D. (2017). Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Politik*. 22 (1), 91-104.
- Mitchell, J.M & Mitchel, W.C. (1993). Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. *Jurnal Politik*. 3, 4-5.
- Purwanto, 2011. “Fenomena Tunjangan Berbasis Kinerja Dalam Perspektif Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 5 Nomor 1 Juni hlm. 13-15. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara.
- Puspitapuri, Wulan. (2017). *Pegawai Negeri Sipil: Pola Karir Sesuai Perspektif Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014*. *Jurnal Administrasi Publik*. 8 (1), 38-39.
- Rakhmawanto, A. (2015). Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintahan (Studi Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri. *Jurnal Bina Praja*. 7 (3), 227-238.
- Rosyadi, S. (2007). Imbalan Berbasis Kinerja: Implikasinya terhadap Reformasi Manajemen Kompensasi PNS. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS (Civil Service)*. 1 (1), 45-60.
- Ruyatnasih HY, Nelly M, Asep YH. (2013). Pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan pada divisi engineering PT Bridgestone Karawang. *Jurnal Manajemen*. 10(3):1087–92.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Sagara, Y., Yustini, S. (2019). Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 12 (2), 2019.
- Santos, G.S. (1965). "The Rule of Law in Unconventional Warfare", *Phillipine Law Jurnal*, 3, 455.
- Santosa, A. B. (2014). Sistem Penganggaran Pendidikan Tinggi dari Old Public Management Menuju New Public Management. *Jurnal Kependidikan*. 2 (2), 127-142.
- Saragih, B.R. (2008). "Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Reformasi Birokrasi", *Jurnal Hukum*. 3 (1), 38.
- Soetjipto, A., Seda, F.E., Noor, I.R. (2014). Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri: Studi Kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 16 (2), 293-304.
- Sudarma, K. (2014). Professional Behavior Based on The Development of Employees. *Jurnal Dinamika Manajemen*. 5 (1), 1-11.
- Sudira, P. G. E. N. dan Sudarma, N. (2014). Pengaruh Hubungan Kerja, Komunikasi, dan Tingkat Kesejahteraan terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan PT. BPR Sari Dananiaga Tabanan. *Jurnal Manajemen*, (Online), 3 (5): 1308.
- Sudrajat, T. (2011). Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Politik di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol.11 Nomor 3.
- Sukadi, (2007). Praktik Belajar Kewarganegaraan Berbasis Kebijakan Publik dan Peningkatan Kecakapan Kewarganegaraan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran UNDIKSHA*, 40 (3).
- Susanto, Sahid. (2000). *Otonomi Perguruan Tinggi* dalam situs <http://zkarnain.tripod.com/SAHID.HTM>.
- Tutik, Titik Triwulan. (2013). Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau dari Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013*.
- Widya Utama, Kartika. (2017). OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PTN-BH. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 Nomor 1, Januari 2017, Halaman 92-99.
- Zuriah, N. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural sebagai Wahana Pendidikan Hukum dan Kesadaran Konstitusi. *Jurnal Wawasan Hukum*. 23 (2), 207-222.

Disertasi

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Simanungkalit, J.H.U.P. (2012). Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia (Suatu Analisis Kompensasi dan Pilihan Strategi Kompensasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan Pemerintah Kota Depok). Disertasi pada Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Tesis

Tahar, I. (2012). Kajian Sistem remunerasi Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Bank Indonesia. Tesis pada Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Astridina. (2017). Sistem Remunerasi Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Komparasi pada Tiga PTNbh). Tesis pada Program Studi Manajemen dan Bisnis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak diterbitkan.

Makalah

Gunawan, Y. (2016). Peluang dan Tantangan Pengembangan PTN Badan Hukum Dari Sisi Regulasi. Makalah pada Seminar “Kedudukan Hukum dan Peluang Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan Kantor Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan komunikasi Institut Teknologi Bandung, 29 November 2016.

Hadjon, P M. (1994). *“Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Makalah Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Makalah ini disampaikan dalam Rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga 3 November 1994.

Mahfud, MD. (1999) Tinjauan Substansial reformasi Hukum, Makalah pada semiloka Refleksi Kritis terhadap proses reformasi. Yogyakarta.

----- (2016). Kedudukan PTN Badan Hukum Dalam Tata Hukum Indonesia. Makalah pada Seminar “Kedudukan Hukum dan Peluang Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan Kantor Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan komunikasi Institut Teknologi Bandung, 29 November 2016.

Soewoto. (1994). *“Hak Asasi Manusia Masalah Konsep, Penjabaran, Pelaksanaan dan Pengawasan di Indonesia”*, Makalah pada Dies Natalis Brawijaya ke-31 Universitas Brawijaya 1 Januari 1994.

Tanya, B.L. (2006). “Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebuah Perspektif”, Makalah untuk Seminar tentang Judicial Review dan Arah

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

Media Masa/Internet.

1. <http://news.detik.com/berita/3155967/ratusan-pns-ugm-demo-tuntut-tunjangan-kinerja-yang-mandek-selama-15-tahun>
2. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/09/04/ratusan-karyawan-ui-demo-tuntut-pembayaran-tunjangan-kinerja>
3. <https://www.change.org/p/tendik-ptnbh-resah-sudah-4-tahun-lebih-tidak-dapat-tukin-dan-karir-nya-mentok>
4. <https://www.kingramli.com/2019/08/pemeringkatan-perguruan-tinggi-dari.htm>
5. <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/08/18/kemenristekdikti-umumkan-peringkat-perguruan-tinggi-2016/>
6. <https://l1dikti13.ristekdikti.go.id/2016/08/17/peringkat-12-besar-kampus-indonesia-tahun-2016/>
7. <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/100-besar-perguruan-tinggi-non-poli-teknik-dan-25-besar-perguruan-tinggi-politeknik-di-indonesia-tahun-2017/>
8. <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2018/08/17/pengumuman-an-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-tahun-2018/>
9. <https://www.idntimes.com/life/education/dian-arthasalina/10-perguruan-tinggi-terbaik-tahun-2019-versi-ristekdikti/full>
10. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/02/27/10064621/ui-dan-itb-masuk-daftar-200-universitas-terbaik-asia-pasifik>
11. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/14/183500065/8-universitas-negeri-indonesia-yang-masuk-peringkat-1000-terbaik-dunia?page=all>
12. <https://nasional.kontan.co.id/news/keren-6-universitas-indonesia-masuk-peringkat-dunia-versi-the-terbaru>
13. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen>
14. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan>
15. <http://zkarnain.tripod.com/SAHID.HTM>
16. <http://www.scribd.com/doc/13764660/MANAJEMEN-DESENTRALISASI-DAN-OTONOMI-PERGURUAN-TINGGI-by-Indra-Maipita>
17. <https://aipi.or.id/frontend/opinion/detail/4232315150773d3d>
18. <https://edukasi.kompas.com/read/2013/03/09/13252223/Dejawatanisasi.Pendidikan?page=all>
19. <http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

20. <https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Panja-RUU-CiptaKerja-Lanjutan-Pembahasan-DIM-Pembentukan-Lembaga-SUI-Generis-LPI>).
21. Reinventing Government (Mewirusahaakan Birokrasi) “How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector” (jogjaprovo.go.id)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2312).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2361).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) .
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5452).

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453).
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454).
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535).
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720).
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721).
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hassnuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722).

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207).

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298).

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 79).

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 238).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1496).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1163).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggung-jawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1078).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 770).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 145).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1594).

Panduan Program Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2021. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 2725/UN40/HK/2016 tentang Remunerasi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 2817/UN40/HK/2016 tentang Remunerasi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 4204/UN40/HK/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2725/UN40/HK/2016 Remunerasi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 0014/UN40/HK/2017 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 0015/UN40/HK/2017 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 3543/UN40/HK/2017 tentang Pengadaan Pegawai Tetap Universitas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 0425/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 1806/UN40/HK/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 0425/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 1807/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 0426/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.

Putusan Pengadilan

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012. (2012) tentang Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Endang, 2021

TATA KELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu